

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)	15
B. Visi dan Misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	19
C. Struktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Hukum	21
B. Pemerintah Daerah	25
C. Kebijakan dan Jenis Kebijakan Pemerintah	29
D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	37
E. Pengawasan	39
F. Keuangan Daerah Yang Timpang	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Dalam Melakukan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Yang Bersifat Lintas Sektoral	
1. Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD.....	45
2. Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD..	47
3. Audit Investigasi Terhadap Indikasi Penyimpangan Keuangan Daerah	48
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	50
B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Tugas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Dalam Melakukan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Yang Bersifat Lintas Sektoral	
1. Penyampaian Hasil Pembahasan APBD dan Laporan Penggunaan APBD Terlambat/Tidak Tepat Waktu.....	51
2. Laporan Penggunaan APBD dari SKPD Kurang Transparan	52
3. Tenaga Audit Yang Masih Kurang	54
4. Laporan Hasil Pengawasan Dilakukan Secara Global dan Tidak Per SKPD	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN